

BAB VI

KESIMPULAN

6.1. Simpulan

Dalam berbagai produk yang diekspor, salah satunya ekspor unggulan Indonesia adalah ekspor kopi. Salah satu negara yang menerima ekspor kopi instan terbesar Indonesia adalah Filipina. Kementerian Perdagangan Indonesia menyatakan bahwa di tahun 2018, Filipina telah melakukan penghambatan ekspor produk kopi kemasan Indonesia. Hambatan mereka lakukan dengan menerapkan tindakan pengamanan perdagangan atau special safeguard (SSG). SSG merupakan salah satu instrumen kebijakan perdagangan yang diatur oleh organisasi dagang dunia atau WTO berupa pengenaan tarif bea masuk tambahan produk impor yang dianggap memonopoli atau menguasai pasar dalam negeri sehingga merugikan petani negara pengimpor.

SSG itu sendiri menjadi strategi bagi negara yang merasa tidak diuntungkan atau menginginkan keuntungan lain atau lebih, untuk menggunakan mekanisme hambatan sebagai strategi ekonomi negara tersebut. Kecenderungan mekanisme hambatan seringkali terjadi di sektor pertanian, mengingat sektor tersebut menjadi fokus atau bidang yang seringkali menjadi area vital dalam perdagangan internasional.

Secara spesifik, strategi ini digunakan untuk mengatasi persoalan impor dari negara lain yang dianggap merugikan. Untuk meredakan kekhawatiran impor berlebihan atau harga rendah ke pasar yang baru dibuka, pengaturan khusus dibuat untuk memungkinkan pengenalan langkah-langkah upaya perlindungan khusus atau *special safeguard* (SSG) pada produk yang diberi tarif.

Special Safeguards (SSG) merupakan salah satu instrumen kebijakan perdagangan yang diatur WTO berupa pengenaan tarif bea masuk tambahan produk impor yang dianggap memonopoli atau menguasai pasar dalam negeri sehingga merugikan petani negara pengimpor.

Apa yang dilakukan Filipina merupakan strategi ekonomi dalam menciptakan hambatan sebagai solusi dalam mengatasi persoalan ekonomi, pertanian, atau hanya sekadar untuk meningkatkan posisi tawar dalam hubungan politik dan mencari keuntungan ekonomi, menjadi cara bagi negara tersebut untuk mendapatkan keuntungan lebih. Secara spesifik, strategi ini digunakan untuk mengatasi persoalan impor dari Indonesia yang dianggap merugikan. Untuk meredakan kekhawatiran impor berlebihan atau harga rendah ke pasar yang baru dibuka, pengaturan khusus dibuat untuk memungkinkan pengenalan langkah-langkah SSG pada produk kopi instan Indonesia.

Kondisi ini menggambarkan langkah kebijakan SSG yang diterapkan Filipina merupakan hambatan bagi Indonesia meski di sisi lain, justru memperkuat posisi Filipina sebagai negara yang berupaya meningkatkan kemampuan impor negara tersebut, terutama berbagai produk pertanian yang menjadi sektor andalan negara tersebut.

Ketentuan SSG dilihat sebagai bagian dari portofolio instrumen manajemen perdagangan untuk mengurangi dampak perjanjian pada industri yang sensitif terhadap impor. Langkah-langkah ini dapat dilakukan untuk melindungi industri dalam negeri. Pertanian Langkah-langkah perlindungan pertanian memiliki nilai strategis bagi Filipina untuk dapat bersaing dalam level bilateral maupun regional.

Indonesia merupakan negara yang telah lama melakukan ekspor kopi instan yang memberikan keuntungan. Di sisi lain, Filipina yang melakukan impor produk kopi instan dari Indonesia merasa merugi akibat tidak adanya timbal balik dalam hubungan ekspor-impor tersebut.

Di sisi lain, kopi merupakan hasil pertanian yang diperdagangkan secara luas dan menjadi komoditas yang paling penting setelah minyak bumi. Saat ini, Indonesia merupakan salah satu pemasok kopi penting di dunia setelah Brazil, Vietnam dan Kolombia.

Sejak Filipina menetapkan special safeguard atas impor kopi instan di Agustus sampai dengan September 2018, ekspor terhenti. Kerugian akibat

pengenaan hambatan dagang Filipina melalui mekanisme SSG, yang diterima Indonesia cukup besar.

Untuk itu, Indonesia melakukan diplomasi ekonomi yang memang ditujukan untuk mengamankan sekaligus menjaga keseimbangan produk ekspor Indonesia ke negara lain, terutama ketika Indonesia dihadapkan pada persoalan produk ekspor kopi instan Indonesia ke Filipina yang mengalami hambatan SSG. Diplomasi ekonomi Indonesia secara bilateral menjadi opsi ketika kedua negara memiliki perbedaan cara pandang yang tidak terkait dengan institusi internasional, seperti WTO (World Trade Organisation).

Langkah Kementerian pertanian dan juga kementerian perdagangan merupakan sinergi kementerian yang ditujukan sebagai bagian dari strategi Indonesia dalam mengamankan keamanannya untuk menyelesaikan persoalan antara Indonesia dengan Filipina. Diplomasi ekonomi Indonesia tersebut sesuai dengan visi dan dukungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mendorong berbagai pertemuan ekonomi yang dapat memperkuat kerja sama dalam menghadapi perdagangan global, dan sejalan dengan semangat kedua negara di Masyarakat Ekonomi ASEAN dalam mendukung kemitraan ekonomi komprehensif regional.

Hasil dari pertemuan tersebut mengarah pada kesepakatan kedua negara untuk menyelesaikan persoalan SSG dengan menghasilkan kesepakatan yang dianggap menguntungkan kedua negara. Pemerintah Indonesia dan Filipina sepakat memperkuat hubungan perdagangan dan investasi antara kedua negara. Kesepakatan tersebut dicapai pada pertemuan bilateral. Dari hasil negosiasi, Filipina mengajukan beberapa tuntutan yakni berupa fasilitasi masuknya komoditas pertanian mereka berupa buah pisang, nanas maupun bawang merah agar dapat masuk ke Indonesia.

Salah satu perusahaan terbesar manufaktur Indonesia, Mayora Group, telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) pembelian kelapa dan turunannya dengan beberapa perusahaan Filipina, serta MoU terkait investasi perusahaan tersebut di Filipina. Dengan kata lain, diplomasi ekonomi Indonesia sebagai strategi dalam menyelesaikan hambatan SSG berjalan dengan baik dan

mampu mendorong kembali berjalannya ekspor produk kopi instan Indonesia yang sempat terhenti akibat mekanisme SSG yang dijalankan Filipina.

6.2. Saran

6.2.1. Saran Teoritis

Penelitian ini merupakan bentuk penelitian yang memfokuskan pada diplomasi ekonomi Indonesia Filipina Jepang untuk memperbaiki kerenggangan hubungan kedua negara yang disebabkan hambatan SSG dan upaya Filipina dalam memproteksi produk pertanian domestik yang kalah bersaing dengan produk kopi instan Indonesia. Menariknya, penelitian ini menjelaskan dua aktor negara yang menekankan ketidakseimbangan dalam neraca ekspor-impor kedua negara. Namun, mekanisme SSG yang diatur oleh WTO menjadi cara yang memang dipersiapkan bagi negara-negara dengan produk pertanian yang kurang kompetitif untuk menaikkan nilai ekspor sekaligus mempromosikan hasil pertanian domestik untuk masuk ke pasar internasional.

Penelitian yang dilakukan ini pada akhirnya menjelaskan diplomasi ekonomi Indonesia melalui bentuk bentuk kesepakatan yang dijalankan melalui negosiasi antar pejabat kedua negara sekaligus pertemuan dengan Presiden Filipina untuk menyelesaikan hambatan SSG Filipina terhadap ekspor kopi instan Indonesia. Kesepakatan kedua negara dalam hubungan yang sempat merenggang, mendorong adanya permintaan Filipina untuk juga memasuki pasar Indonesia melalui mekanisme ekspor produk pertanian, seperti pisang dan mendorong investasi oleh perusahaan nasional yang selama ini menjadi produsen kopi instan.

Karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk menarik minat jika terdapat penelitian-penelitian lain yang ingin melanjutkan pembahasan tentang langkah negosiasi sekaligus kalkulasi keseimbangan ekspor-impor yang dilakukan Indonesia secara lebih mendalam, terutama yang terkait dengan fluktuasi nilai ekspor-impor dalam produk pertanian berupa kopi dan hasil pertanian lainnya.

Harapannya, penelitian ini menjadi dasar bagi para peneliti lain yang ingin melanjutkan penelitian tentang hubungan ekspor impor antara Indonesia-Filipina,

untuk melakukan berbagai variabel ekspor-impor yang tidak tercakup di dalam penelitian ini, seperti persoalan pasar domestik, tingkat kerugian produk pertanian lokal, keterkaitan antara neraca ekspor kopi dan impor pisang cavandis oleh Indonesia, serta pengaruh kerugian ekspor kopi instan dengan peluang pasar ekspor Indonesia yang harus bersaing ketat dengan Vietnam, serta kekuatan negara-negara eksportir lainnya di Filipina.

6.2.2. Saran Praktis

Hubungan baik antar kedua negara kembali terjalin paska disepakatinya langkah ekspor produk pertanian Filipina dan investasi oleh Mayora di Filipina. Hal itu mendorong dicabutnya mekanisme SSG oleh Filipina sehingga ekspor produk kopi instan Indonesia dapat masuk kembali ke pasar domestik Filipina.

Kondisi tersebut menjelaskan bahwa Indonesia dihadapkan pada posisi tawar Filipina yang cukup kuat dalam menghadang ekspor kopi instan Indonesia. Hal ini menjadi sebuah *lesson learn* bagi pemerintah Indonesia dalam menjaga pasar ekspor agar kejadian yang sama tidak terulang kembali.

Selain itu, pola kebijakan SSG yang diterapkan negara tersebut sebetulnya sudah menjadi kebiasaan atau rutinitas Filipina dalam menjaga kepentingan ekonominya terhadap negara-negara eksportir. Karena itu, penting bagi pemerintah Indonesia untuk mewaspadaikan berbagai bentuk SSG yang kemungkinan diterapkan Filipina pada produk-produk ekspor Indonesia lainnya.

Perlu dipahami juga, bahwa Indonesia bukanlah satu-satunya negara yang mengalami hambatan SSG oleh Filipina, untuk itu, pentingnya memahami situasi negara lain yang juga mengalami hambatan SSG yang sama, untuk melihat pola penyelesaian sekaligus peluang pasar bagi Indonesia ketika ekspor produk pertanian negara lain sedang mengalami hambatan.